

BAB IV

HASIL PERJUANGAN R.A. KARTINI DAN DEWI SARTIKA

Perjuangan Kartini dan Dewi Sartika baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang sosial dan politik identik dengan perjuangannya melawan ketidaksetaraan gender yang menempatkan perempuan tidak mendapat akses yang setara dengan laki-laki. Kata gender sendiri adalah perbedaan kebiasaan/tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan berdasar pada norma-norma yang berlaku di masyarakat.¹ Dalam masyarakat Jawa dan Sunda ketika masa hidup kedua tokoh yang kita bahas, menempatkan perempuan di bawah dominasi laki-laki.

Mitos merupakan salah satu penyebab ketidaksetaraan gender yang terjadi di masyarakat. Misalkan mitos masyarakat Jawa yang menggambarkan perempuan Jawa dengan ungkapan “3M” yaitu *masak*, *macak*, *manak* (memasak, berhias, hamil/melahirkan). Artinya perempuan hanya berkutat di tiga hal tersebut.² Itulah salah satu alasan mengapa masyarakat pada waktu itu enggan untuk meyekolahkan anak perempuannya. Dalam lapangan inilah Kartini dan Dewi Sartika berjuang menuntut kesetaraan dalam bidang pendidikan maupun sosial.

Tuntutan akan kesetaraan gender erat kaitannya dengan gerakan feminisme. Sebagai suatu gerakan feminisme sendiri bertujuan untuk membangun suatu strategi politis yang berguna untuk mengintervensi kehidupan sosial demi

¹ Rahayu Relawati, *Konsep dan Aplikasi Penelitian Gender*. (Bandung: Muara Indah, 2011), hlm. 4.

² *Ibid.*, hlm. 6.

mengabdikan kepada kepentingan perempuan.³ Pendidikan yang menjadi alat yang digunakan Kartini dan Dewi Sartika sebagai strategi politis untuk selanjutnya menjadi jalan bagi generasi perempuan sesudahnya untuk mengubah pandangan masyarakat yang melemahkan kedudukan perempuan. De Stuers menempatkan kedua tokoh ini kedalam para pelopor gerakan feminisme Indonesia.⁴ Gerakan feminis ini tidak hanya muncul di Indonesia, melainkan merupakan suatu gerakan yang muncul di negara-negara lain namun dengan corak yang berbeda. Dibandingkan dengan kaum feminis barat, Kaum feminis di dunia ketiga menghadapi masalah yang lebih kompleks karena pandangan seksisme dan ketidaksetaraan sosial-politis yang mereka lawan seringkali berkaitan dengan kepercayaan dan praktek budaya yang mengakar.⁵

A. Bidang Pendidikan

Perkembangan selanjutnya dari gerakan awal Kartini dan Dewi Sartika adalah pada tahun 1912. Selain berdirinya *Kartinifonds* yang diprakarsai oleh van Deventer dan perkumpulan Kautamaan Istri dua tahun sebelumnya, muncul berbagai perkumpulan yang bertujuan untuk mengusahakan bantuan keuangan untuk gadis-gadis yang ingin melanjutkan sekolah. Diantara perkumpulan tersebut adalah Putri Mardika, Madju Kemuliaan di Bandung, Wanito Rukun Santoso di Malang, Karadjinan Amai Setia di Sumatra, Kaoetamaan Istri Minangkabau di Padang Panjang, dll. Sedemikian banyaknya

³ Chris Barker, *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: Kreasi Wacan, 2009), hlm. 238.

⁴ Lihat Cora Vrede-De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaiannya*. (Depok: Komunitas Bambu, 2017), hlm. 43-72

⁵ Margaret Walters, *Feminisme: Sebuah Pengantar Singkat*. (Yogyakarta: Divapress, 2021), hlm. 172.

perkumpulan itu menunjukkan ambisi besar untuk segera mendirikan sekolah bagi perempuan sebanyak-banyaknya. Selain itu mereka juga turun langsung untuk mendidik dan mengajar kaum perempuan.⁶

Kartinifonds sendiri berhasil mendirikan sekolah pertamanya pada tahun 1913 di Semarang, Batavia dan *Buitenzorg*, tahun 1914 di Madiun, tahun 1916 di Malang dan Indramayu, tahun 1917 di Pekalongan dan tahun 1918 di Indramayu. Sementara itu dari pihak pemerintah Hindia Belanda mendirikan Sekolah Guru (*Kweekschool*) di Salatiga untuk guru-guru wanita, pada tahun 1921 mendirikan Sekolah Normal (*Normaalscholen*) untuk sekolah guru setingkat di bawah Sekolah Guru.⁷ Meskipun Kartini telah meninggal pada tahun 1904 namun cita-citanya yang tersebar melalui surat-suratnya yang diterbitkan kemudian menemukan sendiri penerus-penerusnya yang memiliki kepedulian yang sama dengan Kartini yaitu kemajuan pendidikan perempuan pribumi.

Sakola Keutamaan Istri yang didirikan oleh Dewi Sartika juga mengalami kemajuan setelah 8 tahun pertama mendirikan sekolahnya yang pertama pada tahun 1905, pada tahun 1913 di Bandung, di Tasikmalaya tahun 1913, Padang Panjang pada 1915, Sumedang dan Cianjur pada tahun 1916, Ciamis tahun 1917, Cicurug, Sukabumi tahun 1918, di Kuningan Jawa Barat tahun 1922 dan di Sukabumi tahun 1926.⁸ Dalam perkembangannya sekolah ini bertahan

⁶ Marwati Djoened Pusponogoro & Nugroho Notosusanto (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia V*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 241.

⁷ Sitisomandari Soeroto, *Kartini Sebuah Biografi*. (Jakarta: Gunung Agung, 1977), hlm. 409.

⁸ Rochiati Wiriaatmadja, *Dewi Sartika*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), hlm. 81.

cukup lama yakni sampai kedatangan Jepang yang kemudian dengan semena-mena menutup sekolah tersebut dan ketika membukanya kembali mewajibkan pengajarannya harus sesuai dengan kebijakan pemerintah Jepang. Dewi Sartika sendiri menolak ketika ia ditawarkan menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut.

Perjuangan pendidikan yang dirintis oleh keduanya mengalami kemajuan yang cukup signifikan disekitar 2 dekade berikutnya. Menurut laporan pemerintah Hindia Belanda murid perempuan yang mengikuti sekolah sekolah pelatihan pada 1927 mencapai 1.835 siswi.⁹ Keberhasilan Kartini dan Dewi Sartika tidak hanya tentang jumlah sekolah dan murid perempuan yang pada akhirnya dapat bersekolah. Dapat dikatakan bahwa keduanya merupakan pendobrak adat kolot feodalisme yang memojokkan kaum perempuan dan tidak memberi perempuan kesempatan untuk bercita-cita tinggi. Meskipun pada awalnya melalui berbagai rintangan dan penolakan dari berbagai pihak namun keduanya tidak menyerah dan berhasil menjati jembatan sekaligus inspirasi bagi gerakan perempuan setelahnya untuk melanjutkan cita-cita memajukan kaum perempuan di Indonesia.

B. Pergerakan Perempuan

Tidak hanya dalam bidang pendidikan, dalam bidang pergerakan perempuan secara umum juga mengalami kemajuan yang mengagumkan. Jika sebelumnya gerakan feminis bersifat non-politis, individual dan seporadis, di tahun 1910an muncul berbagai organisasi perempuan. Pada tahun 1912 organisasi Putri Mardika dan Kautaman Istri-nya Dewi Sartika berdiri.

⁹ Cora Vrede-De Stuers, *op.cit.*, hlm. 91.

Organisasi-organisasi pergerakan pada waktu itu juga membentuk organisasi khusus perempuan seperti Aisjijah (Muhammadiyah), Sarekat Perempuan Islam Indonesia (Sarekat Islam), Jong Java, Federasi Pemuda Rakyat Sumatera, Jong Minahasa, Jong Ambon dll.¹⁰ Sampai akhirnya pada tahun 1928 organisasi-organisasi tersebut berhasil mengadakan kongres perempuan pertama di Indonesia. Kongres tersebut merupakan suatu bentuk kelanjutan yang lebih terorganisir dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia dan akan kita lihat bahwa pandangan-pandangan emansipasi dari Kartini dan Dewi Sartika rupanya juga menjadi pembahasan dalam kongres tersebut.

Dalam perjuangannya untuk emansipasi wanita pandangan Kartini dan Dewi Sartika tidak terbatas pada persoalan pendidikan semata. Melainkan juga menyinggung isu-isu lain. Seperti ketika Kartini mengkritik praktek poligami yang menurutnya sangat merendahkan kedudukan perempuan. Dalam suratnya kepada Estella Zeehandelaar bertanggal 23 Agustus 1900 Kartini menulis:

“...tidakkah saya dengan sendirinya harus membenci, memandang rendah perkawinan, kalau perkawinan itu menganiaya perempuan sangat mengerikan... perempuan di daerah Gubernemen sudah merasa celak sekali dengan seorang, dua, tiga, empat orang selir suaminya. Di daerah Kerajaan, perempuan dianggap sebagai permainan kanak-kanak. Di sana hampir tidak ada seorang laki-laki pun yang hanya mempunyai satu orang istri. di kalangan bangsawan lebih-lebih dalam lingkungan raja, laki-laki mempunyai sampai lebih dari 26 orang istri...”¹¹

28 tahun setelah Kartini menulis surat tersebut, Djojoadiguno salah satu pembicara dalam di Kongres Perempuan 1 di Yogyakarta yang merupakan

¹⁰ *Ibid.* hlm. 77-87.

¹¹ R.A. Kartini, *Habis Gelap Terbitlah Terang*. (Yogyakarta: Narasi, 2011), hlm. 79.

utusan organisasi Wanita Utomo menyampaikan pidatonya yang bernada sama dengan Kartini.

“...Menurut hukum agama Islam, laki-laki boleh beristri lebih dari satu orang, ya, hingga empat orang pun juga boleh. Hal inilah yang menyakitkan hati perempuan dan juga merendahkan derajatnya perempuan dan menimbulkan berbagai kesulitan. Oleh karena itu, kita tau bahwa kaum perempuan berdaya upaya menghilangkan keadaan buruk itu...”¹²

Pandangan Kartini yang sebelumnya hanya berupa kritik telah berkembang menjadi suatu ajakan untuk kaum perempuan agar mewujudkan kesetaraan dalam perkawinan terutama dalam hal penolakan terhadap poligami. Pada Kongres Perempuan ketiga 1938 Maria Ulfa Santoso yang kelak menjadi menteri sosial pertama Indonesia, menyampaikan pidatonya yang berupa laporan rinci tentang isu perkawinan dan poligami. Dalam pidato tersebut Maria Ulfa menyebut pentingnya agar dibuat suatu undang-undang perkawinan yang lebih melindungi hak-hak perempuan. Ia pun sampai pada kesimpulan bahwa sedikit demi sedikit kita akan menyetujui bahwa dalam masyarakat Indonesia poligami harus dihilangkan.¹³

Perjuangan melawan poligami ini terus menjadi isu penting dalam pergerakan perempuan. Pada Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) tahun 1950 meskipun belum menjadi undang-undang namun sudah menghasilkan suatu dorongan tentang perjanjian perkawinan umum yang salah satu poinnya memuat tentang keharusan seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari istri pertama.¹⁴ Selanjutnya melalui jalan panjang dan

¹² Susan Blackburn, *Kongres Perempuan Pertama*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 220.

¹³ Cora Vreede-De Steurs, *op.cit.*, hlm. 156.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 186.

mendapat perlawanan dari berbagai pihak, akhirnya gerakan perempuan di Indonesia yang sejak lama mendorong adanya undang-undang perkawinan mencapai keberhasilan dengan disahkannya UU Perkawinan pada tahun 1974. Pada pasal 5 undang-undang tersebut diatur tentang syarat seorang suami untuk berpoligami adalah dengan mendapatkan izin istri sebelumnya.¹⁵

Dewi Sartika sendiri juga tidak hanya berkecimpung pada isu-isu pendidikan saja. Salah satunya ia pernah menyuarakan ketidakadilan upah yang diterima pekerja perempuan. Dalam salah satu pidatonya ia menyebut:

“...Dalam pemberian upah kepada kaum perempuan saya melihat masih ada perbedaan yang tidak sehat. Upah bagi kaum pria lebih tinggi dibanding upah untuk kaum perempuan, padahal jenis pekerjaan yang mereka lakukan sama ... Jika perbedaan itu tidak segera diatasi dan diperbaiki, saya yakin di masa depan nilai harkat seorang perempuan tidak lebih dari harga meubel di rumah.”¹⁶

Perjuangan dalam bidang pekerja/buruh perempuan ini kemudian menjadi suatu gerakan nyata di tangan seorang perempuan bernama S.K. Trimurti yang juga merupakan Menteri Perburuhan pertama Indonesia dalam kabinet Amir Sjarifuddin. Pada tahun 1946 ketika ia masih aktif di Barisan Buruh Wanita (BBW) ia menuntut akan perbaikan kondisi buruh perempuan. Tidak hanya mengenai upah melainkan juga tentang perlindungan bagi buruh perempuan yang hamil/melahirkan, kesehatan dan penjagaan kehormatan buruh perempuan di tempat kerja.¹⁷ Selama menjabat sebagai menteri perburuhan ia berperan sangat aktif di dalam perjuangan untuk menyejahterakan buruh terutama juga

¹⁵ Undang-Undang no.1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, pasal 5.

¹⁶ Yan Daryono, *Raden Dewi Sartika Sang Perintis*. (Bandung: Grafiti, 2008), hlm. 102.

¹⁷ Ipong Jazimah, *S.K. Trimurti: Pejuang Perempuan Indonesia*. (Jakarta: Kompas, 2016), hlm. 151.

buruh perempuan. Keberhasilan ini dapat dilihat ketika disahkannya UU Perburuhan tahun 1948 yang di dalamnya diantaranya berkaitan tentang jam kerja perempuan, bahwa perempuan dilarang diperkerjakan malam hari kecuali perawat dan bidan, ia juga mengeluarkan peraturan mengenai cuti haid, cuti tiga bulan bagi buruh perempuan saat hamil dan melahirkan.¹⁸

Perjuangan S.K. Trimurti untuk menyejahterakan kaum buruh khususnya buruh perempuan maupun Maria Ulfa Santoso dan organisasi perempuan lain dalam bidang hak perempuan dalam perkawinan merupakan gerak lanjut dari perjuangan perempuan Indonesia untuk mencapai kesetaraan. Sebagai pelopor gerakan feminis awal di Indonesia Dewi Sartika dan Kartini berkontribusi sebagai peletak dasar atau sekurang-kurangnya sebagai perempuan yang menunjukkan ketidakadilan yang diterima oleh perempuan baik melalui tulisan maupun gerakan yang kemudian perjuangan keduanya dilanjutkan oleh gerakan perempuan generasi setelahnya.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 169.